

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) secara terbuka menyatakan bahwa dunia sedang menghadapi pandemi global, yaitu *Corona Virus Infectious Disease 2019* atau COVID-19 (Li et al., 2020). Virus *Corona* pada awalnya diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 dan sejak saat itu berkembang biak dengan sangat cepat di seluruh dunia. *Coronavirus* adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala yang terkait dengan virus ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari flu biasa (batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala) hingga komplikasi parah seperti pneumonia atau sepsis. Kemudahan dan kecepatan penyebarannya membuat virus *corona* menjadi ancaman global yang signifikan. Pandemi ini memiliki dampak yang menyeluruh di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dsb.

Menanggapi penyebaran virus *corona* yang cepat dan meluas, pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko penularan. Langkah-langkah ini termasuk kebijakan yang membatasi aktivitas di luar rumah, penutupan lembaga pendidikan, pengaturan kerja jarak jauh, dan strategi lain yang secara kolektif disebut sebagai “*lockdown*” (Yunus & Rezki, 2020). *Lockdown* adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi gerak dan aktivitas masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini umumnya diterapkan di area tertentu seperti kota, provinsi, atau negara dengan variasi tingkat keketatan yang berbeda. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghentikan penularan virus dengan mengurangi interaksi sosial, melambat penyebaran COVID-19, serta mengurangi jumlah kematian akibat virus COVID-19 (Kemenko PMK, 2020). Penerapan kebijakan *lockdown* oleh berbagai negara dalam menanggapi penyebaran virus secara global telah menghasilkan

transformasi penting dalam cara hidup masyarakat. Sektor pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan sebagai akibat dari penutupan sekolah dan universitas serta adopsi pembelajaran jarak jauh atau *online* yang cepat.

Selain penerapan kebijakan *lockdown*, organisasi internasional seperti *World Health Organization* (WHO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan berbagai organisasi lain di bawah naungan PBB memainkan peran penting dalam memberikan panduan, bantuan teknis, dan mengoordinasikan respons global terhadap pandemi. Organisasi-organisasi ini merupakan entitas yang terstruktur dari beberapa negara atau wilayah yang berkumpul untuk bekerja sama dalam isu-isu global seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan internasional, dsb. Organisasi-organisasi ini sering kali beroperasi di tingkat global atau regional dengan fokus pada masalah-masalah yang bersifat lintas batas, menyediakan platform untuk kolaborasi antar-negara dalam menangani tantangan kompleks yang mempengaruhi komunitas global (Reinalda, 2009).

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam tata kelola komunitas global. Mereka terlibat dalam upaya kolaboratif, memfasilitasi diplomasi, dan mengatasi tantangan transnasional (Dhama, 2023). Organisasi internasional memfasilitasi interaksi, negosiasi, dan koordinasi kebijakan antar negara. Selain itu, mereka membantu menetapkan norma, peraturan, dan standar yang mendorong stabilitas global dan pembangunan berkelanjutan. Organisasi internasional berkolaborasi untuk mengatasi isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, krisis kesehatan, pendidikan, dan untuk mempengaruhi tata kelola global serta mempromosikan masyarakat yang lebih saling terhubung dan kooperatif (Dhama, 2023).

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam masyarakat dengan memungkinkan berbagai mekanisme dukungan, seperti kolaborasi, bantuan kemanusiaan, dialog antarpemerintah, dan transformasi masyarakat yang konstruktif. Selain itu, organisasi internasional dapat digunakan sebagai alat, arena, atau aktor independen dalam konteks hubungan

internasional. Salah satu contoh organisasi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum adalah *United Nation Children's Fund* (UNICEF), sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk kesejahteraan anak-anak dan ibu-ibu di seluruh dunia, yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *United Nation Children's Fund* (UNICEF) didirikan pada tanggal 11 Desember 1946, dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak di wilayah yang terkena dampak konflik, termasuk Eropa, China, dan Timur Tengah. Tujuan utama UNICEF adalah membangun dunia di mana setiap anak dapat merasakan pendidikan yang sehat, menyenangkan, dan aman (UNICEF, 2020a). Salah satu contoh kontribusi yang dilakukan oleh UNICEF dalam memajukan pendidikan anak adalah dengan melaksanakan berbagai inisiatif pendidikan serta memberikan pelatihan bagi para guru, yang semuanya bertujuan untuk menjamin kesiapan terbaik bagi para siswa untuk mencapai prestasi akademis.

Masa depan sebuah negara sangat tergantung pada mutu pendidikan yang disediakan bagi warganya. Pendidikan berperan krusial dalam kemajuan suatu bangsa. Kemajuan keseluruhan suatu negara sering kali dikaitkan dengan kualitas pendidikannya. Sebaliknya, kualitas pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan kemunduran dan keterbelakangan (Putra, 2022). Aristoteles memandang pendidikan sebagai salah satu tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan yang mendasari keberadaan negara itu sendiri. Negara dilihat sebagai entitas sosial utama yang bertanggung jawab untuk memastikan pencapaian tujuan utama manusia, yaitu kebahagiaan (Nurhakim, 2023). Dia berpendapat bahwa pendidikan adalah persiapan mendasar untuk setiap kegiatan atau pekerjaan yang berharga. Sangat penting bagi institusi pendidikan untuk mematuhi peraturan yang telah diterapkan yang memastikan keselarasan dengan perkembangan psikologis siswa yang terus berkembang. Sistem pendidikan yang efektif menghasilkan individu-individu berpotensi tinggi dan membantu kemajuan negara. Seperti yang diungkapkan oleh Theodore Meyer Greene, pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia

mencapai kehidupan yang bermakna. Mengingat pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan suatu bangsa, banyak negara termasuk Vietnam menjadikannya sebagai salah satu fokus utama.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) di Vietnam memiliki sejarah yang mendalam. Setelah kemenangan Revolusi Agustus pada tahun 1945, Pemerintah Republik Demokratik Vietnam (DRV) menandatangani Dekrit 146, yang menetapkan dasar bagi sistem pendidikan baru, termasuk *Bậc học Đấng trī* untuk anak-anak di bawah usia tujuh tahun (Vu, 2021). Penandatanganan dekrit ini menandai dimulainya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Vietnam. *Ministry of Education* (MoE) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program tersebut.

Ministry of Education and Training (MoET) Vietnam menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak. Salah satu inisiatif ini melibatkan pengiriman sejumlah tenaga pendidik ke Republik Demokratik Jerman untuk mengikuti pelatihan pendidikan anak usia dini antara tahun 1956 dan 1958 (Pham et al., 2006). Selain menyediakan pendidikan bagi sejumlah guru, Vietnam juga memperluas jumlah lembaga pendidikan dan mengimplementasikan perubahan dalam kurikulum dan pedagogi. Negara ini telah beralih dari pedagogi yang berpusat pada guru ke pendekatan yang berpusat pada anak, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Perkembangan ini mencerminkan komitmen Vietnam untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan memastikan mereka mendapatkan awal yang optimal dalam kehidupan (Vu, 2021).

Perkembangan pendidikan di Vietnam telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun dalam perkembangannya juga muncul berbagai tantangan dan hambatan signifikan yang memengaruhi akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak. Tantangan-tantangan ini terutama dialami oleh kelompok rentan, seperti anak perempuan, anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak dari kelompok etnis minoritas, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kesulitan dalam pendidikan anak di Vietnam

meliputi kemiskinan, diskriminasi, infrastruktur dan fasilitas sekolah yang tidak memadai, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan berdedikasi, terbatasnya dukungan dari orang tua dan masyarakat, serta kurangnya kebijakan dan anggaran yang memadai dari pemerintah.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerusakan yang signifikan tidak hanya di Vietnam, tetapi juga secara global. Setelah *World Health Organization* (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, semua sekolah dan perguruan tinggi ditutup untuk mencegah kerumunan orang, dan beralih sepenuhnya ke pengajaran dan pembelajaran daring (Dhawan, 2020). Perubahan mendadak ini mengganggu proses belajar mengajar dan memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada dalam dunia pendidikan (Thanh et al., 2023).

Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Penutupan institusi pendidikan secara mendadak memaksa siswa dan pengajar untuk beralih sepenuhnya ke pembelajaran daring sebagai satu-satunya pilihan untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Perubahan ini menuntut adaptasi yang cepat dari semua pihak terlibat, baik dalam hal teknologi maupun pendekatan pengajaran. Selama pandemi ini, pembelajaran digital telah menjadi krusial bagi lembaga pendidikan di seluruh dunia, fokus utamanya adalah pada pembelajaran online, literasi digital, serta dampaknya terhadap pencapaian akademik (Bakare & Okuonghae, 2023). Pandemi ini telah mendorong transisi ke platform digital dalam pendidikan, menyoroti tantangan seperti disparitas digital yang berkaitan dengan status sosial ekonomi (Abu Bakar et al., 2023). Pandemi telah memperluas kesenjangan dalam pembelajaran digital, terutama di wilayah-wilayah ekonomi rendah di mana akses digital masih sulit diperoleh. Secara keseluruhan, pandemi telah mempercepat penerimaan pembelajaran digital dan menyoroti manfaat serta tantangannya dalam memastikan akses yang adil dan pemanfaatan yang efektif untuk keberhasilan pendidikan.

Penutupan institusi pendidikan karena pandemi COVID-19 berdampak pada 21 juta anak di Vietnam dan menunjukkan kesenjangan

digital yang signifikan, di mana hanya 17% dari siswa yang tinggal di daerah pegunungan terpencil memiliki akses internet (UNICEF Vietnam, 2021). Selain itu, motivasi belajar siswa di Vietnam juga mengalami dampak negatif ketika mereka mengikuti pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Banyak siswa menyatakan kesulitan dalam mempertahankan minat mereka dalam pembelajaran online dan mengungkapkan keinginan untuk kembali belajar secara langsung. Siswa perlu beradaptasi dengan pembelajaran virtual yang baru, sementara guru berupaya mengajar dengan cepat menggunakan konten dan sumber daya yang terbatas (Tran et al., 2021). Para siswa Vietnam juga menyoroti kebutuhan akan lebih banyak dukungan akademis karena beberapa guru mengajar dengan cepat dan menggunakan sumber daya pengajaran yang melampaui buku pelajaran, yang menyulitkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran (Bao, 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap pendidikan secara signifikan, sehingga memunculkan konsep pembelajaran digital. Istilah "*Digital Learning*" digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi digital untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Istilah ini mencakup berbagai platform dan aplikasi yang memfasilitasi akses yang fleksibel dan interaktif terhadap konten pendidikan baik dalam konteks formal maupun informal. Perkembangan ini didorong oleh kemajuan teknologi, termasuk berkembangnya internet berkecepatan tinggi, munculnya perangkat seluler yang hemat biaya, dan munculnya perangkat lunak pembelajaran yang semakin canggih. Selain meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan secara global, pembelajaran digital juga memfasilitasi penyesuaian pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan individu. Namun demikian, penerapan pembelajaran digital bukan tanpa tantangan. Tantangan tersebut antara lain kesenjangan akses terhadap teknologi di berbagai wilayah dan kesulitan dalam memastikan kualitas pembelajaran yang efektif dan terintegrasi dengan kurikulum tradisional.

Pandemi telah mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan, menghasilkan metode pengajaran baru seperti kelas video langsung, modul *e-learning* interaktif, dan alat kolaborasi virtual. Namun, hal ini juga mengungkapkan kesenjangan digital karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat atau koneksi internet yang stabil, yang membatasi partisipasi mereka dalam pembelajaran digital. Pandemi ini telah mengubah peran siswa secara signifikan, memerlukan mereka untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan bantuan teknologi informasi yang memungkinkan mereka tetap terhubung secara sosial dan kognitif dalam proses belajar (Yu, 2022). Transformasi ke pembelajaran digital ini menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Meskipun teknologi memfasilitasi kelanjutan pendidikan selama penutupan sekolah, banyak siswa dan guru menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan pembelajaran *online*. Kendala seperti akses terbatas ke perangkat teknologi, koneksi internet yang tidak stabil, dan kekurangan pelatihan untuk pengajaran *online* menjadi hambatan utama yang dihadapi.

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan berbagai tantangan baru dan memperburuk masalah pendidikan yang sudah ada di Vietnam. Perubahan mendadak dalam sistem pembelajaran telah menimbulkan kesulitan bagi Vietnam dalam menangani masalah ini. Kurangnya kesiapan dari tenaga pengajar, keterbatasan dukungan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan daring, dan tantangan akses internet bagi para siswa adalah beberapa dari berbagai masalah yang dihadapi. Pandemi ini juga telah menyoroti ketidaksetaraan dan kesenjangan pendidikan antara anak-anak yang berasal dari keluarga mampu di perkotaan dengan mereka yang berasal dari keluarga miskin di pedesaan.

Rana Flowers, Kepala Perwakilan UNICEF di Vietnam, mengatakan bahwa Vietnam telah menjadi pelopor dalam transformasi digital di sektor pendidikan dibandingkan negara-negara lain. Pernyataannya tersebut disampaikan saat konferensi mengenai transformasi digital dalam sektor pendidikan ASEAN, di mana ia mengapresiasi upaya besar dan tanggapan

cepat yang ditunjukkan oleh sektor pendidikan Vietnam dalam mengatur pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 (Nga, 2020). Sekitar 80% siswa di Vietnam dapat mengakses pembelajaran daring, menurut laporan *Programme for International Student Assessment – Organisation for Economic Co-operation and Development* (PISA – OECD) yang dirilis pada 29 September. Laporan ini menunjukkan berbagai aspek positif dalam implementasi pembelajaran daring di Vietnam selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan negara dan wilayah lainnya. Lebih dari 79% negara anggota OECD (67,5%). Namun, Rana Flowers yang menjabat sebagai perwakilan UNICEF di Vietnam, menggarisbawahi perlunya upaya lebih besar dari Vietnam untuk mengikuti perkembangan baru ini dan memastikan bahwa semua anak dan orang dewasa dapat mengambil bagian dalam dan mendapatkan manfaat dari pendidikan digital ini (Nga, 2020).

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dalam usahanya untuk menyediakan pendidikan yang optimal bagi anak-anak dan memahami pentingnya pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan untuk semua anak, pemerintah Vietnam telah bermitra dengan UNICEF untuk memfasilitasi penyediaan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Vietnam. Sejak tahun 1975, UNICEF telah bekerja sama dengan pemerintah Vietnam dan mengakumulasi pengalaman serta keahlian yang berharga dalam mendukung perubahan positif di sektor pendidikan (UNICEF Vietnam, 2015).

UNICEF berkolaborasi dengan pemerintah Vietnam untuk mendukung pengembangan pendidikan digital bagi anak-anak yang tidak memiliki akses internet dan tinggal di daerah pedesaan. Tujuan kolaborasi ini adalah mengurangi ketimpangan, membangun masyarakat inklusif yang melindungi hak-hak semua anak, terutama yang paling rentan. UNICEF menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, media, dan komunitas lokal untuk mempromosikan pembelajaran digital bagi seluruh anak di Vietnam. Melalui upaya bersama ini, pemerintah Vietnam bertujuan untuk mencapai visi meningkatkan sistem pendidikan dan mempersiapkan

anak-anak dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kontribusi UNICEF sebagai organisasi internasional yang mengedepankan kesejahteraan anak dalam perkembangan pembelajaran digital di Vietnam, terutama dengan adanya berbagai masalah yang muncul sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Penelitian ini akan menjelaskan tentang kondisi pendidikan anak di Vietnam, program *Reimagine Education* yang UNICEF lakukan terhadap perkembangan pembelajaran digital anak, dan akan menjelaskan bagaimana implementasi dari program *Reimagine Education* di Vietnam. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis mengajukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi United Nation Children’s Fund (UNICEF) terhadap Perkembangan Pembelajaran Digital bagi Anak-Anak di Vietnam Selama Masa Pandemi COVID-19”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memilih untuk meneliti isu tertentu dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana UNICEF berkontribusi pada pengembangan pembelajaran digital bagi anak-anak di Vietnam melalui program *Reimagine Education* selama masa pandemi COVID-19”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka, penulis membuat pembatasan masalah sehingga dapat membatasi penelitian agar lebih terfokus. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan UNICEF sebagai aktor utama dalam mendukung pendidikan anak yang bekerja sama langsung dengan *Ministry of Education and Training (MoET)* Vietnam. Serta penulis menetapkan rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2022 sebagai periode spesifik karena penutupan sekolah dampak dari pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak permasalahan

baru dan juga memperburuk pendidikan yang sudah terjadi di Vietnam. Perubahan sistem pembelajaran yang awalnya berupa *face-to-face* antara guru dan murid di sekolah berubah 180° menjadi pembelajaran online dari rumah yang mengakibatkan berbagai masalah baru serta memperjelas ketidaksetaraan dan juga kesenjangan pendidikan bagi mereka anak-anak yang lahir dari keluarga mampu dan tinggal di perkotaan dengan mereka anak-anak yang lahir dari keluarga yang miskin dan tinggal di daerah perdesaan.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan anak di Vietnam.
2. Untuk melihat apa saja program yang UNICEF lakukan terhadap pengembangan pembelajaran digital bagi anak-anak di Vietnam.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program *Reimagine Education* di Vietnam.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam studi Hubungan Internasional mengenai kontribusi UNICEF terhadap pengembangan pembelajaran digital bagi anak-anak di Vietnam.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan ujian tingkat sarjana dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan Bandung.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Mahasiswa

- Berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi menjadi sebuah karya tulis ilmiah.
- Berperan sebagai sarana untuk melakukan penelitian yang lebih menyeluruh tentang Ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam aspek Organisasi Internasional.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan kepada masyarakat secara lebih menyeluruh mengenai kinerja suatu lembaga internasional yang berfokus pada urusan kemanusiaan dan pelaksanaan tugas yang ditugaskan oleh PBB.